



Program Studi Sosiologi  
Agama  
Fakultas Teologi  
UKSW

# WASKITA JURNAL STUDI AGAMA DAN MASYARAKAT

**Building Trust and Social Solidarity in the Public Sphere  
in the Perspective of Indonesia**

*Izak Lattu*

**Hubungan Antar Agama dalam Kebhinekaan Indonesia  
(Studi Kasus Terhadap Hubungan Warga Jemaat GPIB Tamansari Pospel  
Kalimangli dengan Warga Muslim di Dusun Kalimangli)**

*Jeneman Pieter, John A. Titalay*

**Ketidakadilan Ekonomi di Bumi Pancasila**

*Melkisedek Sni'ut*

**Tugas Pemuridan Dalam Relasi Lintas Iman di Sumba**

*Herlina Ratu Kenya*

**Tinjauan Teologis Mengenai Makna Pengakuan Dosa dalam Liturgi Gereja  
Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB)**

*1956 Selestyani, Ebenhaizer I Nuban Timo*

**Gereja dalam Konteks Relasi Negara dan Masyarakat (Sebuah Upaya  
Memahami Reposisi Peran Politis Gereja)**

*Ronald Helweldery*

**Globalisasi dan Kearifan Lokal (Menyikapi Globalisasi, Refleksi terhadap  
komunitas Pattuvam Panchayat di India)**

*Retnowati*

# Susunan Redaksi

Waskita: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat

## Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Teologi UKSW

## Ketua Dewan Editor:

Izak Lattu

## Editor Pelaksana:

Ebenhaizer I Nuban Timo

## Dewan Editor

John A. Titaley

Retnowati

David Samiyono

Rama Tulus Pilakoannu

## Mitra Bestari

Fachrival Halim (University of Saskatchewan, Kanada)

Kevin Fogg (Oxford University, Inggris)

Muhammad Ali (The University of California, Riverside, Amerika Serikat)

Sumanto Al Qurtuby (King Fahd University of Petroleum & Mineral, Arab Saudi)

Sylvia Tiwon (The University of California, Berkeley, Amerika Serikat)

## Staf Administrasi/Distribusi

Adi Setia

## Lay-out / Setting

Adi Setia

## Pengantar Redaksi

Gereja adalah satu kenyataan sosial di antara berbagai realita sosial lainnya. Sebagai realita dimaksud gereja bukan hanya merupakan bagian integral dari sistem sosial. Ia juga memiliki kesempatan yang sama dengan organisasi atau paguyuban sosial lainnya untuk memaknai peran aktif dalam pembentukan opini publik, bahkan juga dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi kesejahteraan dan kesetaraan semua warga masyarakat. Secara khusus, sebagai bagian dari struktur masyarakat perkotaan, gereja berada dekat dengan pusat-pusat kekuasaan dan aktivitas-aktivitas politik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Itu berarti gereja mempunyai akses untuk turut terlibat dalam ranah publik dan dapat mempengaruhi proses pembahasan serta pengambilan keputusan-keputusan terkait arah dan kebijakan pemerintahan.

Namun diskursus dan praksis publik politik ini hanya menjadi topik-topik pinggiran dalam gereja. Ini berdampak pada ketidakjelasan pemosisian dan pemfungsian politik gereja dalam konteks dinamika relasi negara dan masyarakat. Tulisan ini berusaha menunjukkan bahwa panggilan memasuki ruang publik politik, yang tercipta dari relasi dinamik antara negara dan masyarakat, sangat penting untuk ditanggapi serius oleh gereja.

Tulisan-tulisan yang tersaji dalam edisi Waskita kali ini yang diramu di bawah tema: Pancasila dan *Civil Society* mengajak pembaca untuk melihat bagaimana peluang-peluang terbuka tadi seharusnya dimanfaatkan oleh gereja. Izak Lattu membuka wacana dengan mengajukan sebuah tesis yang menarik bahwa *civil society* menciptakan peluang bahwa lembaga-lembaga dalam masyarakat untuk ambil bagian dalam pembentukan opini publik sekaligus mencermati struktur-struktur politik. Artikel yang dia persiapkan memfokuskan perhatian pada keterlibatan warga masyarakat dalam menjembatani kesenjangan-kesenjangan relasi antara unit-unit sosial yang berbeda-beda. Bertolak dari perspektif interdisiplin penulis mengkritisi pengembangan teori *civil society* dalam konteks keilmuan. Di bagian penutup, penulis melakukan eksplorasi terhadap dua institusi keagamaan di Indonesia untuk menunjukkan urgensi *civil society* dalam pentas relasi antar umat beragama. Dalam relasi antara komunitas agama yang

berbeda-beda, *civil society* berperan sebagai instrumen untuk menjembatani perbedaan-perbedaan itu sekaligus mendorong Indonesia menuju negara yang lebih demokratis dan komunitas yang damai dan ramah.

Jeneman Pieter dan John A. Titaly menunjukkan kepada kita satu contoh dari hasil penelitian di dusun Kalimangli bahwa koeksistensi damai antara pemeluk agama Kristen dan Muslim bukan sebuah kemustahilan. Agama-agama universal memiliki segudang referensi nilai yang memungkinkan koeksistensi tadi. Adalah tugas semua pemeluk agama, lembaga keagamaan dan pemerintah untuk mencermati dan menumbuhkembangkan nilai-nilai tadi.

Melkisedek Sni'ut memperkaya diskursus dalam edisi kali ini dengan membedah persoalan perekonomian di Indonesia yang semakin rumit karena roh kapitalis. Hadirnya kapitalisme tentu saja memberi dampak kemajuan tingkat kehidupan dan *income* masyarakat, tetapi satu hal yang kurang diperhatikan ialah makin lemahnya kedaulatan ekonomi bangsa seiring pemarginalisasian simpul-simpul ekonomi rakyat. Sebuah contoh kasus dari Kabupaten Timor Tengah Selatan di Propinsi Nusa Tenggara Timur dia jadikan pijakan untuk menolong kita melihat persoalan itu secara lebih mendalam.

Penulis selanjutnya, Herlina Ratu Kenya menarik perhatian kita pada simbolisme masyarakat suku sumba yang berwujud dalam konsep rumah, *uma bunguru*. Ia jadikan konsep budaya tadi sebagai pijakan untuk mengembangkan sebuah eklesiologi, pemahaman tentang gereja yang menurutnya bersifat lebih ramah dan merangkul. Kalau diskursus tadi kita tempatkan dalam bingkai besar tema edisi Waskita kali ini, menjadi jelas juga bahwa *uma bunguru* merupakan wacana *civil society* yang tersimpan dalam khasanah budaya dan kearifan lokal suku-suku dan unit-unit sosial di bumi Nusantara.

Tulisan yang lahir sebagai hasil kolaborasi antara mahasiswa dan dosen, atas nama Selestyani dan Ebenhaizer I Nuban Timo menghadirkan kepada kita satu warna tersendiri dalam kajian tema kali ini. Mereka mengajak gereja-gereja dan juga pembaca yang budiman untuk melakukan pengakuan dosa terhadap berbagai kelalaian dalam ikut ambil bagian membangun kehidupan bersama yang adil, akrab dan ramah. Melalui kajian terhadap isi doa pengakuan dosa dalam liturgi peribadahan Gereja Protestan

Indonesia bagian Barat, mereka menunjukkan bahwa pengakuan dosa yang diucapkan gereja dalam ibadah-ibadah minggunya justru mengandung dosa, mengingat pengakuan dosa itu lebih banyak berhubungan dengan dosa-dosa kultus. Dosa-dosa sosial jarang disinggung dalam doa-doa tadi.

Kembali kepada pokok bahasan *civil society*, Ronald Helweldery melalui artikel berjudul Gereja dalam Konteks Relasi Negara dan Masyarakat (Sebuah Upaya Memahami Reposisi Peran Politis Gereja) menyerukan kepada gereja untuk memanfaatkan peluang-peluang terbuka dalam masyarakat berkeadaban (*civil society*) untuk ikut membentuk opini publik, mengawasi struktur-stuktur kekuasaan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik untuk kesejahteraan bersama. Dengan bantuan teori sosial kritis Jurgen Habermas penulis mendeskripsikan dan memperkenalkan karakteristik ruang publik dan *civil society*. Ruang publik politik dan *civil society* merupakan ruang dan wahana strategis bagi partisipasi politik gereja dalam keberpihakan kepada masyarakat di hadapan kekuasaan politik (negara) dalam relasi kolusif dengan kekuasaan ekonomi.

Edisi Waskita kali ini ditutup dengan tulisan Retnowati, yang membahas pokok mengenai Globalisasi dan Kearifan lokal. Menurut penulis, Globalisasi sebagai sebuah proses sejarah dan sekaligus sebuah proyek ekonomi memberi pengaruh terhadap struktur sosial dan tingkat kesejahteraan manusia. Ada pengaruh yang bersifat positif seperti tersedianya informasi yang dapat diakses secara cepat, masif, dan ekonomis serta terjalannya kehidupan manusia oleh jaringan komunikasi dan transaksi global. Namun ada pula pengaruh negatif seperti persaingan sosial, budaya, agama, politik, dan bisnis, kerusakan lingkungan alam akibat eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan. Menyikapi pengaruh negatif dari globalisasi ia mengajak kita untuk belajar dari komunitas *Pattuvam Panchayat* di India yang menurut dia memberi inspirasi bagi kita bahwa perlunya belajar dari kearifan komunitas lokal ketika berhadapan dengan gempuran keras globalisasi.

Inilah pokok pikiran yang digumuli oleh para penulis dalam Jurnal Waskita kali ini. Dengan gaya yang khas tetapi juga menantang, para kontributor edisi ini menyodorkan bagi kita citra berpikir dan berlogia secara baru dan segar dalam menyikapi kehidupan *civil society* yang boleh dibilang sebagai budaya populer bagi

masyarakat masa kini. Sambil mengucapkan puji syukur kepada Allah yang ikut menyelenggarakan kegiatan penerbitan kembali Jurnal Waskita, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang berkenan menyisihkan waktu luang di antara kesibukan rutin untuk mempersiapkan tulisan-tulisan yang dimuat dalam edisi ini.

Terima kasih juga kepada dewan redaksi yang bekerja keras untuk edisi ini. Dorongan para alumni dan pencinta jurnal ini agar segera memperoleh edisi penerbitan kembali, juga merupakan motivasi bagi terbitnya jurnal ini. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu kami juga mengucapkan terima kasih disertai doa: "Tuhan memberkati jerih dan juang kita."



**DAFTAR ISI**

Pengantar Redaksi .....	i
Daftar Isi .....	v
Building Trust and Social Solidarity in the Public Sphere in the Perspective of Indonesia <i>Izak Lattu</i> .....	1
Hubungan Antar Agama dalam <i>Kebhinekaan</i> Indonesia (Studi Kasus Terhadap Hubungan Warga Jemaat GPIB Tamansari Pospel Kalimangli dengan Warga Muslim di Dusun Kalimangli) <i>Jeneman Pieter, John A. Titaley</i> .....	19
Ketidakadilan Ekonomi di Bumi Pancasila <i>Melkisedek Sni'ut</i> .....	67
Tugas Pemuridan Dalam Relasi Lintas Iman di Sumba <i>Herlina Ratu Kenya</i> .....	79
Tinjauan Teologis Mengenai Makna Pengakuan Dosa dalam Liturgi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) <i>Selestyani, Ebenhaizer I Nuban Timo,</i> .....	93
Gereja dalam Konteks Relasi Negara dan Masyarakat (Sebuah Upaya Memahami Reposisi Peran Politis Gereja) <i>Ronald Helweldery</i> .....	123
Globalisasi dan Kearifan Lokal (Menyikapi Globalisasi, Refleksi terhadap komunitas <i>Pattuvam Panchayat</i> di India) <i>Retnowati</i> .....	147

# KETIDAKADILAN EKONOMI DI BUMI PANCASILA

Melkisedek Sni'uth

## Abstrak

Akhir-akhir ini perekonomian Indonesia semakin dikuasai oleh kaum kapitalis. Dengan demikian bangsa Indonesia yang semestinya memiliki kedaulatan ekonomi menjadi tidak berdaulat lagi. Buktinya, ketika terjadi pergolakan dan krisis ekonomi di luar negeri maka bangsa Indonesia pun mengalami dampaknya pula. Sebuah contoh kasus dari Kabupaten Timor Tengah Selatan di Propinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat (lebih dari 75%) bekerja sebagai petani yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan tersebut terjadi bukan hanya karena tingkat pendidikan yang rendah. Sebaliknya kemiskinan tersebut lebih disebabkan oleh pengelola pemerintahan yang mengabaikan pasal 33 UUD 1945 dalam membangun ekonomi bangsa Indonesia. Para Kapitalis yang mestinya memperoleh wilayah "sisa" dari BUMN/BUMD dan koperasi justru memperoleh ruang gerak yang sangat luas. Akibatnya ekonomi Pancasila yang mestinya dilaksanakan dalam semangat persatuan, kebebasan, kesederajatan dan kekeluargaan diabaikan. Hal ini terjadi karena tiga hal. Pertama, bangsa Indonesia kurang percaya diri dalam mengembangkan sistem ekonominya sendiri. Kedua, Pancasila hanya dilihat sebagai dokumen politik, budaya dan agama saja dan belum dilihat sebagai dokumen ekonomi. Ketiga, pengusaha swasta dibiarkan mengontrol kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kepentingannya. Untuk mengatasi ketiga hambatan tersebut diketengahkan beberapa contoh pemberdayaan ekonomi rakyat yang ditempuh oleh beberapa pemerintah di NTT seperti program "Anggur Merah", "Gerbang Emas" dan program "Perak". Contoh-contoh itu disebutkan untuk menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia mesti didasarkan pada sikap kebersamaan, kekeluargaan dan semangat gotong royong.

**Kata Kunci:** Kedaulatan ekonomi, Kapitalisme, Kabupaten timor Tengah Selatan

## Pangantar

Akhir-akhir ini perekonomian Indonesia semakin bercorak dan dikuasai kapitalisme. Hampir semua perusahaan besar dan roda perekonomian dikuasai oleh kaum kapitalis dari dalam maupun luar negeri. Hal ini terlihat dari semakin tergantungnya perekonomian nasional pada badan-badan dunia seperti Bank Dunia, IMF dan lain-lain. Bahkan gejolak harga dan krisis ekonomi di luar negeri punya potensi yang sangat besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia di bidang ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Beberapa contoh yang dapat disebutkan di sini